

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA KOKA KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA

JULIANA SONDA  
BURHANUDDIN KIYAI  
HELLY KOLON DAM  
[Sondajuli12@gmail.com](mailto:Sondajuli12@gmail.com)

### Abstrak

Implementasi Kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan salah satu program kebijakan yang dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat Desa dimana Masyarakat merupakan tujuan atau yang menjadi sasaran utama dari tiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berpacu pada teori Edward III sebagai fokus penelitian dalam mengukur keberhasilan Implementasi Kebijakan yang dibuat Pemerintah Desa Koka dalam Pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berdasarkan Aspek komunikasi, Sumber daya, Disposisi/Sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini merupakan aspek yang sangat berpengaruh yang dapat menentukan berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan. Hasil penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Koka sampai saat ini terealisasi atau berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

### Abstract

*Policy Implementation is a process of implementing policies carried out by the government as implementing policies that are directed achieving the objective set in a policy decision. Community Economic Empowerment is one of the policy programs that can help the community, especially the village community, where the community is the goal or the main target of each policy carried out by the government. In this study aims to find out how the implementation of policies carried out by The Government in Community Economic Empowerment in Koka District, Tombulu, Minahasa District. The method that I use in this research is qualitative research method that is racing on Edward's III theory as the focus of research in measuring the success of policy implementation made by Koka Village Government in the implementation of community economic empowerment based on structures. These four aspects are very influential aspects that can determine the success or failure of a policy implementation. The result of the research were carried out through data collection obtained through observation and interviews. The results of the study that the process of community economic empowerment in Koka Village has been realized or is going well.*

**Keyword:** Policy Implementation, Community Economic Empowerment.

### PENDAHULUAN

Desa Koka merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. jumlah penduduk yang tinggal di Desa Koka ada 3119 Jiwa warga. Desa Koka merupakan salah satu desa yang memiliki berbagai potensi baik dari sumber daya alam

maupun sumber daya manusia. Potensi sumber daya alam dibidang pertanian sendiri dapat menghasilkan hasil-hasil perkebunan masyarakat desa seperti jagung, kacang tanah, kacang kedelai, cabai, dan sayuran. Sedangkan potensi sumberdaya manusia di Desa Koka memiliki beberapa tenaga terampil dibidang kerajinan, perbengkelan,

ahli dibidang bangunan, serta pertukangan lainnya.

Memberdayakan masyarakat mengandung arti mengembangkan, memandirikan, dan memperkuat posisi masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Di samping itu juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas masyarakat lemah.

Pengembangan merupakan upaya mendorong terjadinya perubahan sosial yang sistematis, terencana, dan terkontrol. Perencanaan dan pengawasan yang teratur menjadi cara pendekatan untuk menggerakkan masyarakat agar terjadinya perubahan kearah perbaikan taraf hidupnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni, Desa berhak (1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, (2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa (3) Mendapatkan sumber pendapatan selain itu juga desa berkewajiban untuk Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, Mengembangkan kehidupan demokrasi, Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Kebijakan Pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya dalam pengembangan ekonomi masyarakat untuk penanggulangan masalah kemiskinan dan kesenjangan yang ada.

Berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi ketenagakerjaan di Desa Koka sampai akhir Tahun 2016, masih

menunjukkan keadaan kondusif, walaupun di pihak lain masih dihadapkan pada keterbatasan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja yang cukup banyak. Masyarakat Desa Koka sebagian besar bekerja sebagai petani, dan pelaku usaha menengah kebawah. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat tentunya menjadi prioritas utama pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

*People centered development*” adalah salah satu paradigma pembangunan yang menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia. mempunyai arti bahwa manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dan kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam mengaktualisasikan segala potensinya.

Banyaknya pencari kerja di Desa Koka adalah sebagai akibat masih kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya ketersediaan modal usaha hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan utama Pemerintah Desa Koka dalam memberdayakan masyarakat yang ada.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera adalah salah satu kebijakan program bantuan pemerintah Desa Koka untuk masyarakat yang kurang mampu. Program ini sudah dijalankan sejak Tahun 2017 lalu, dalam hal ini pemerintah desa memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang memiliki usaha menengah kebawah dengan tujuan agar dapat meningkatkan atau mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan memperkuat kerjasama kelembagaan lewat kelompok usaha bersama menuju masyarakat yang sejahtera. Bentuk pembagian bantuan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera ini dibagi atas 10 kelompok yaitu setiap kelompok terdiri atas 5 orang dan tiap kelompok diberikan modal dana senilai 5 juta rupiah untuk dapat dipakai guna mengelola dan meningkatkan hasil usaha yang ada. Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Prasejahtera ini dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar kelompok untuk memperoleh modal yang lebih dari modal utama yang diberikan dan 5% dari hasil usaha yang didapat tiap bulannya diberikan kepada pemerintah desa sebanyak 10 kali untuk kemudian dibagikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha namun belum mendapat bagian dari program ini karena pemberdayaan merupakan suatu proses berkelanjutan dan memiliki banyak indikator-indikator lain yang harus dicapai selain peningkatan modal usaha masih berlanjut.

### **Konsep Implementasi**

Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjukkan untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Budi Winarno)

### **Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah suatu proses pembuatan Kebijakan Oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri Abdul Solichin Wahab (2010).

### **Konsep Implementasi Kebijakan**

Menurut George C. Edward III (Leo Agustino 2008:194) Implementasi kebijakan memiliki aspek penting dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dapat dilihat dari aspek:

#### 1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-

individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

#### 2. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

#### 3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

#### 4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

#### Proses Implementasi Kebijakan

Dalam mencapai keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan, maka dalam proses implementasi diperlukan sumberdaya manusia dan proses administratif. Salah satu tugas dari pemerintah adalah “Merancang dan membuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam dalam peraturan-peraturan”. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak akan mempunyai arti apabila tidak diimplementasikan. Menurut pendapat ini tidak kalah pentingnya, pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan pemerintah dengan benar dan mempersiapkan sumber daya serta perangkat kebijakan dengan baik. Pemerintahan yang baik juga bermakna akuntabilitas transparansi, partisipasi dan keterbukaan (Bambang Istianto 2009:26).

Menurut Repley dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:71) proses implementasi kebijakan “yaitu bagaimana setelah melalui serangkaian proses yang panjang suatu kebijakan kemudian mampu mewujudkan tujuan atau sasaran yang dicapai”. Pendapat ini melihat bahwa suatu keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada kepatuhan para implementor saja, namun hasil yang dicapai setelah prosedur implementasi dijalani perlu dilihat secara detil dengan mengikuti proses implementasi itu dilalui.

#### Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Ife dan Tesoriero (2008:510), “Pemberdayaan berarti menyediakan sumber

daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya”.

Menurut Edi Suharto (2010:57) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

#### Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumaryadi (2005: 142), tujuan pemberdayaan masyarakat adalah:

1. membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marginal, rentan, dan kaum kecil, seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang dikesampingkan;
2. memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

#### Konsep Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai suatu kejadian tertentu (Moleong : 2010). Penelitian ini bersifat memaparkan, menafsirkan dan menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Koka. Dalam penelitian deskriptif kualitatif data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi dan diarahkan pada pendeskripsian segera rinci dan mendalam mengenai kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan studinya (Sutopo 2002:40).

informan dalam penelitian ini diambil dari berbagai unsur yang tercakup aparatur- aparatur yang ada di Desa Koka yang nanti akan menuntun peneliti untuk menemukan data dan yang pasti tahu situasi terkini tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang nantinya mereka akan memberikan keterangan yang objektif tentang hal-hal yang menjadi realita yang ada berdasarkan kejadian di lapangan. Jumlah informan yang akan diwawancara dalam penelitian ini sebanyak 7 orang, yaitu : Kepala desa (1 orang); Sekretaris Desa (1 orang); Aparat Pemerintah Desa Bidang; Perencanaan dan Pelaporan (1orang) ; Masyarakat pelaku usaha (4 orang)

Adapun teknik analisis data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif seperti yang di kembangkan oleh Miles, Humberman

### **HASIL PEMBAHASAN**

Sebagian dari anggaran Bagi hasil pajak, Pemerintah Desa Koka membuat Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera dalam bentuk bantuan modal untuk dapat mengembangkan usaha dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat yang ada. Bantuan yang berupa uang tunai senilai 5 juta rupiah diberikan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha yang dibagi berdasarkan 10 kelompok yang tiap kelompoknya terdiri dari 5 orang.

Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat ini sudah mulai dijalankan sejak Tahun 2017. Dan program ini diambil dari bagi hasil pajak. tujuan dari pada pembuatan program bantuan ini agar supaya masyarakat dapat mengolah hasil usahanya dan dapat meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera ini, adalah salah satu kebijakan program yang dilakukan pemerintah Desa Koka dalam menunjang, dan mendorong masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Bantuan berupa uang tunai senilai 5 juta perkelompok di peruntukan bagi masyarakat yang kurang mampu yang memiliki usaha menengah kebawah. Bentuk pembagian atau penyerahan bantuan ini, dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa dalam hal ini yaitu kepala desa.

Program pemberdayaan masyarakat prasejahtera ini telah direncanakan sejak Tahun 2016 lalu dan direalisasikan pada Tahun 2017. Program yang dibuat oleh pemerintah Desa Koka sudah terealisasi dan cukup berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dimana banyaknya masyarakat yang memanfaatkan dan menggunakan bantuan modal ini dengan mengembangkan usahanya masing-masing, ada yang membuka usaha seperti usaha pembuatan kripik, itu di jual ke beberapa kios-kios warung yang ada di

Manado, ada yang mengembangkan usaha kios warung makan,

Ada yang memanfaatkan hasil pertanian dengan membuka kios dagangan di daerah sekitar dan ada yang berdagang dipasaran, dll. Setidaknya jika dilihat bantuan program yang dibuat pemerintah desa ini untuk program pemberdayaan masyarakat, dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang menerima bantuan”

Dengan adanya Program Bantuan Modal usaha yang diberikan Pemerintah desa, kami selaku masyarakat penerima bantuan dapat merasakan adanya keperhatian dan kepedulian dari pemerintah sendiri untuk masyarakat yang ada, apalagi saya yang selaku adalah masyarakat yang tergolong memiliki ekonomi lemah, yang hanya memiliki usaha menengah kebawah jika dilihat tidaklah cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan hanya berjualan kue keliling, tapi lewat adanya bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera ini, saya mulai berfikir untuk meningkatkan usaha saya dengan membuka kios kecil disepertaran Perumahan Koka dengan menjual aneka kue yang berbeda-beda.

### **Pembahasan**

Sebagai proses, Kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak di implementasikan, karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita. Artinya pelaksanaan kebijakan publik berusaha menghasilkan *outcome* yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Dalam hal ini, dapat ditegaskan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan perumusan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan pelaksanaannya tidak diperhatikan optimalisasi implementasinya, maka apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu pada akhirnya pun dipastikan

pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat keputusan (*policy makers*) bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak aspek yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok/institusi lingkungan serta kebijakan itu sendiri.

Fokus utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah desa sendiri dalam memberdayakan masyarakat yang ada lewat program pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera. Sehingga dalam penelitian ini dapat menitik beratkan pada apa yang dilaksanakan oleh implementor kebijakan.

Implementasi kebijakan ukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan sebagian besar ditentukan dari implementasi kebijakan; rencana 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya 20% bagaimana kita mengendalikan implementasi.

Atas dasar itulah penulis membahas aspek yang diuji pada aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam menuju keberhasilan implementasi menurut Edward III yang nantinya akan dibahas satu persatu berkaitan dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

#### **a. Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan salah satu yang menentukannya adalah komunikasi. Dalam aspek komunikasi terdapat 3 hal yang harus diperhatikan yaitu terkait Penyaluran Komunikasi, Kejelasan Informasi, dan Konsistensi Pesan yang disampaikan.

Dalam proses komunikasi pada program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Koka merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. suatu proses komunikasi akan berjalan dengan baik ketika memenuhi beberapa kriteria yaitu:

Pertama, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Dengan adanya Penyaluran informasi yang baik dari Pemerintah Desa Koka sebagai pelaksana kebijakan maka akan lebih memudahkan suatu kebijakan untuk diimplementasikan dan hal ini juga sebagai bentuk untuk menghindari dari namanya miskomunikasi yang sering terjadi pada penyampaian informasi yang disebabkan banyak tingkatan birokrasi sampai pada tataran implementasinya.

Kedua, kejelasan komunikasi oleh pelaksana kebijakan.

Dalam hal ini kejelasan komunikasi oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. sehingga dalam proses implementasi suatu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Koka akan berjalan sesuai dengan informasi yang disampaikan karena adanya kejelasan dalam komunikasi untuk menjalankan suatu kebijakan yang sudah dibuat oleh para pelaksana kebijakan.

Ketiga, konsistensi perintah dari pelaksana kebijakan

Terkait dengan konsistensi perintah dari pelaksana kebijakan yang telah diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk di tetapkan atau disampaikan. jika pada proses komunikasi yang berjalan tidak memehuni tiga proses tersebut, maka dapat menimbulkan permasalahan dan ketidakjelasan pada proses

komunikasi dalam menjalankan kebijakan lewat Program Pemberdayaan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Koka.

b. Sumberdaya

Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan menurut Edward III adalah:

Staff yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.

Staff atau pegawai merupakan faktor utama implementasi kebijakan. Kegagalan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang memang diperlukan atau kompeten dan kapabel sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam proses implementasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Koka, untuk sumber daya cukup untuk bisa melaksanakan suatu implementasi yang diakibatkan oleh faktor yang dimaksud disini serta terdapat pula kapasitas pelaksana kebijakan yang tidak kompeten.

Informasi

Informasi yang berbeda dengan komunikasi yang diperlukan disini adalah: informasi yang terkait dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut.

Fasilitas

Kendati implementor telah memiliki jumlah staff/pegawai yang memadai dan memiliki kemampuan sesuai yang dibutuhkan, namun tanpa fasilitas fisik ini tergantung pada kebutuhan kebijakan (sarana dan prasarana).

## c. Disposisi

Yang dimaksud dengan Disposisi adalah sikap dan komitmen dari Pemerintah Desa Koka dalam menjalankan kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Terdapat 3 unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu; Persepsi, Respon pelaksana, Tindakan pelaksana.

Pertama, berkaitan dengan Persepsi. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Kedua, Respon pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Ketiga, Tindakan Pelaksana. Disposisi atau sikap pelaksana dalam hal ini Pemerintah desa koka akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang

lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

## d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud dalam Edward III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan manakala implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan memelihara banyak institusi untuk mencapai tujuan.

Sebagai proses dari implementasi kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Koka dalam menjalankan Program yang dibuat itu dilaksanakan berdasarkan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan bantuan.

## Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan Pemerintah Desa Koka mengadakan beberapa tahapan yaitu:

## a. Penyuluhan Sosial,

Merupakan suatu kegiatan penerangan tentang Program yang



akan dilaksanakan baik itu dijelaskan secara lisan, tertulis, maupun melalui peragaan. Dalam tahapan Penyuluhan sosial, pemerintah desa koka mengadakan penyuluhan yang bertempat di balai desa, yang melibatkan aparat pemerintah desa bersama dengan masyarakat yang ada.

b. Orientasi dan Observasi.

Merupakan kegiatan pengamatan secara umum sebagai cara pengumpulan data dengan melihat potensi dan sumber-sumber yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang ada. Dalam tahap orientasi dan observasi ini, dilakukan sebelum dilaksanakannya penyuluhan sosial. Kegiatan ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melihat langsung masalah apa yang di temui dilapangan terkait dengan masalah pemberdayaan masyarakat. Disamping itu kegiatan orientasi dan observasi juga berfungsi sebagai acuan untuk program-program pemerintah sebagai penunjang program pemberdayaan masyarakat yang akan dibuat nantinya.

Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Bantuan

Pemerintah Desa Koka dalam menjalankan program yang sudah dibuat, dilaksanakan berdasarkan pembentukan kelompok masyarakat yang nantinya mereka ini merupakan sasaran dari kebijakan yang ada dimana pemerintah desa berdasarkan observasi dilapangan telah mendata 50 anggota masyarakat yang akan menerima bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera. Bantuan yang diberikan pemerintah desa berupa uang tunai senilai 5 juta rupiah dibagi berdasarkan kelompok dan itu diberikan secara langsung. Namun berdasarkan ketentuan yang ada untuk menjalankan

suatu kebijakan agar dapat berjalan efektif dan efisien maka pemerintah desa pun melakukan pengawasan agar program bantuan yang disalurkan oleh pemerintah desa terealisasi dengan baik dan akan terus berlanjut.

## PENUTUP

### KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lewat kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera. Dengan dilakukannya kegiatan program pemberdayaan (penguatan) diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa agar kebijakan yang dibuat dapat menyentuh masyarakat sebagai tujuan dan sasaran dari kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil rangkuman dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi

Aspek penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan berhasil atau tidaknya kebijakan yang dibuat salah satu yang menjadi faktor utama berkaitan dengan komunikasi. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan yaitu berkaitan dengan intensitas informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi pesan yang disampaikan.

2. Sumber daya

Terkait dengan aspek implementasi sumber daya merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud atau diperlukan dalam implementasi kebijakan yaitu terkait dengan staff atau pegawai yang memiliki kemampuan yang kompeten,

yaitu berkaitan dengan informasi yang berhubungan dengan cara pelaksanaan kebijakan juga terkait dengan sumberdaya fasilitas fisik seperti sarana dan prasarana yang memadai itu.

### 3. Disposisi

Dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yang menjadi salah satu aspek penentu agar kebijakan itu dapat dikatakan berhasil ketika adanya sikap dari para pelaksana kebijakan yang memiliki dedikasi tinggi dalam menyikapi kebijakan yang sudah dibuat atau disahkan dalam hal ini berhubungan dengan persepsi, respon, dan tindakan pelaksana kebijakan yang dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pelaksanaan suatu kebijakan.

### 4. Struktur birokrasi,

Aspek penentu selanjutnya dalam keberhasilan implementasi kebijakan, dapat diukur dari aspek struktur birokrasi yang berkaitan dengan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan suatu kebijakan agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana-pelaksana kebijakan, yang dalam hal ini adalah Pemerintah.

## SARAN

Sedangkan untuk saran ada beberapa hal yang perlu disampaikan peneliti berkaitan dengan Implementasi Kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu;

### 1. Komunikasi

Berkaitan dengan komunikasi, diharapkan agar aparat pemerintah desa yang ada, dapat melaksanakan kebijakan yang dibuat berdasarkan komunikasi yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat sebagai sasaran program. Dengan adanya komunikasi yang baik Implementasi kebijakan akan berjalan efektif jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Dengan adanya

komunikasi yang baik berkaitan dengan kebijakan yang akan dibuat akan lebih memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan.

### 2. Sumber daya

Terkait dengan sumber daya, diharapkan dalam hal ini pemerintah desa sebagai pembuat kebijakan harus memiliki personil staff atau pegawai yang kompeten atau memiliki keahlian dalam bidang masing-masing, dan harus memiliki kemampuan juga skill yang bagus, baik dalam intelektual, operasional dan faktor penunjang lainnya. Sarana dan prasarana yang memadai juga kiranya dapat disediakan agar dapat lebih menunjang program kebijakan yang dibuat.

### 3. Disposisi

Terkait sikap para pelaksana (Disposisi), diharapkan pemerintah dapat merespon dan memberikan pendapat atau persepsi yang baik juga diharapkan tindakan yang nyata agar program kebijakan yang dibuat dapat terealisasi dengan baik sehingga dapat menyentuh sasaran yang ada dalam hal ini masyarakat itu sendiri.

### 4. Struktur birokrasi

Terkait dengan hal ini diharapkan pemerintah dapat menyusun mekanisme kerja yang jelas sehingga akan dapat lebih memudahkan para pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan dengan sebaik mungkin, untuk itu perlu disusun rencana kerja dari aparat pemerintah desa, baik itu dalam hal pendampingan maupun pengawasan untuk program kebijakan yang dibuat agar dapat terus berlanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin.2010. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta.: Rineka Cipta.
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung; Alfabeta.

- E A Purwanto dan D R Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ife Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Istianto Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Moleong Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT.Remaja Rosdakarya.
- Suharto Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT.Refika Pratama.
- Sumaryadi 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.